Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
4 (3) 2024, Page 182-190

Analisis Kebutuhan Daerah untuk Pendirian BUMD Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya

D. Yadi Heryadi[1] , Rina Nuryati[2], Zulfikar Noormansyah[3], Yogi Nirwanto[4], Dwi Apriyani[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Siliwangi
Corresponding Author: D.Yadi Heryadi, E-Mail: heryadiday63@yahoo.co.id

Published: Juny, 2024

ABSTRAK

Kebijakan perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk mengakselerasi pencapaian Visi Pembangunan daerah. Guna mencapai Visi tersebut membutuhkan dana besar yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Tasikmalaya saat ini memiliki 6 BUMD yang kinerjanya masih harus ditingkatkan. Guna menghimpun dana pembangunan lainnya direncanakan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perkebunan. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Tujuan dilakukannya penelitian dan analisis ini adalah untuk mengetahui kebutuhan daerah dalam rangka Pendirian BUMD Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya.Metode yang digunakan adalah survey dan mengembangkan deskriptif kualitatif. Berlokasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada 15 Agustus 2023 sampai 30 Oktober 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan melihat berbagai potensi besar yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya maka sudah selayaknya BUMD Perkebunan didirikan di Kabupaten Tasikmalaya dengan melihat variabel-variabel : a. Persepsi responden tentang pendirian BUMD Perkebunan, b.Analisis Potensi Ekonomi, c. Analisis Potensi Pasar dan Pemasaran serta Potensi Tenaga Kerja.

Kata Kunci : BUMD, Perkebunan, Visi, PAD, Analisis

ABSTRACT

The development planning policy in Tasikmalaya Regency is directed to accelerate the achievement of the regional development vision. To achieve this vision requires large funds, one of which comes from Regional Original Income (PAD). Tasikmalaya Regency currently has 6 Regionally-Owned Enterprises (BUMD) whose performance still needs to be improved. To collect other development funds, it is planned through the establishment of a Regionally-Owned Enterprise (BUMD) for Plantation. The establishment of BUMD is based on regional needs and the feasibility of the BUMD's business sector to be established. The purpose of this research and analysis is to determine regional needs in the context of establishing a BUMD for Plantation in Tasikmalaya Regency. The method used is a survey and developing qualitative descriptive. Located in the Tasikmalaya Regency area on August 15, 2023 to October 30, 2023. The analysis of the results shows that by looking at the various great potentials of Tasikmalaya Regency, it is appropriate for a BUMD for Plantation to be established in Tasikmalaya Regency by looking at the variables: a. Respondents' perceptions of the establishment of BUMD for Plantation, b. Economic Potential Analysis, c. Analysis of Market and Marketing Potential, as well as Workforce Potential.

Keywords: Regional-Owned Enterprises, Plantations, Vision, Regional Original Income, Analysis

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebijakan perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk mengakselerasi pencapaian Visi Pembangunan daerah dalam RJPMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Visi yang dibuat menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, adalah "Dengan

semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius, Islami, Berdaya saing dan Sejahtera".Guna mencapai Visi tersebut, daerah membutuhkan dana yang besar untuk menumbuhkan percepatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diantaranya berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sekaitan dengan hal tersebut maka dituntut adanya solusi yang lebih kreatif dan inovatif guna mencari alternatif sumber pembiayaan yang ekonomis namun mampu memberikan imbalan hasil yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai sebagian belanja pembangunan setiap tahunnya.

Sampai saat ini Kabupaten Tasikmalaya memiliki 6 (enam) BUMD, yaitu (1) PT. Bank Cipatujah Jabar, (2) PD. BPR Artha Sukapura, (3) PD. BPR, Artha Galunggung, (4) PT. LKM Pancatengah, (5) PDAM Tirta Sukapura, dan (6) PDUP Tasikmalaya. BUMD dibentuk dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Kinerja BUMD masih harus dilakukan optimalisasi untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang sehingga BUMD akan semakin sehat dan untung.

Berdasarkan hasil analisis Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya diketahui bahwa PAD Kabupaten Tasikmalaya masih sangat bergantung pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, meskipun PAD Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut, dan terjadi penurunan pada tahun 2022. Seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pendapatan (Rp.)	Kemandirian Daerah (PAD/Pendapatan)	Kategori
2018	248.420.386.329	3.557.974.395.890	6,98%	Rendah sekali
2019	288.290.693.896	3.832.391.090.725	7,52%	Rendah sekali
2020	305.887.233.378	3.593.232.008.351	8,51%	Rendah sekali
2021	375.030.394.260	3.241.569.559.918	11,57%	Rendah sekali
2022	305.275.588.113	3.150.502.793.418	9,69%	Rendah sekali

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang juga sebagai regulator di tingkat daerah merencanakan untuk menghimpun dana pembangunan salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perkebunan sebagai wadah di bidang perekonomian yang pembentukannya dilakukan dengan peraturan daerah.

Rencana pembentukan BUMD Perkebunan ini merujuk pada Perpres No 87 Tahun 2021 yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Rujukan lainnya adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 dimana pemerintah dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis telah berketetapan untuk menerapkan pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) dalam membangun perkebunan yang dicita-citakan. Konsep KIMBUN didasarkan pada upaya untuk meningkatkan peran serta, efisiensi

produktivitas dan keberlanjutan di bidang perkebunan. Selain itu juga merujuk pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa Kawasan Priangan Timur dan Pangandaran diarahkan untuk pengembangan kegiatan Pertanian, Industri, Perkebunan, Pariwisata dan Panas Bumi (lampiran IX Pemerintah No 13 Tahun 2017).Pembentukan BUMD Perkebunan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke 3 dan 4 pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.

Rencana pembentukan BUMD khusus perkebunan ini juga mempertimbangkan berbagai hal diantaranya potensi Kabupaten Tasikmalaya pada sub sektor perkebunan, dari luasan Kabupaten Tasikmalaya seluas 270.677,66 Ha, sebanyak 67.609,01 Ha nya digunakan untuk lahan perkebunan yang ditanami dengan beragam komoditas unggulan seperti kelapa, teh, cengkeh, kopi dan aren. Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang saat ini memerlukan penataan kembali pada aspek penggunaan, pemanfaatan dan kepepemilikannya.

Agar pembangunan dan pengelolaan BUMD Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya berhasil guna dan berdaya guna diperlukan peraturan daerah sebagai pedomannya agar pengelolaan BUMD Perkebunan dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna serta mampu menjadi prime over pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk pada ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pada UU No. 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa, pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sekaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dan analisis Kebutuhan Daerah untuk Pendirian BUMD Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Analisis Kebutuhan Daerah untuk Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perkebunan ini dilakukan dengan metode Survey berlokasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka pendirian BUMD di Kabupaten Tasikmalaya.

Guna memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam**,** observasi**,** dan dokumentasi**.** Wawancara dilakukan terhadap semua pemangku kepentingan lainnya guna memahami kebijakan, strategi, serta tantangan dalam tata kelola BUMD. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan operasional BUMD yang ada serta kebijakan-kebijakan yang diambil selama ini. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen yang ada seperti laporan tahunan, kebijakan, regulasi terkait, serta data lainnya yang mendukung analisis penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik**,** yang melibatkan

beberapa tahapan, yaitu reduksi data**,** penyajian data**,** dan penarikan kesimpulan**.** Pada tahap reduksi data, informasi yang telah dikumpulkan disaring dan dikelompokkan berdasarkan tema utama. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisis kebutuhan. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan teori dan konsep yang relevan, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan daerah dalam rangka membentuk BUMD Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengambilan data primer ke lapangan dengan mempertimbangkan kualitas sampel sesuai kaidah akademik melalui observasi lapangan, *Focus Group Doscussion/interview*). Sedangkan data sekunder diperolah dari studi kepustakaan, dokumen yang sudali terckspose pada profil data Instansi/OPD terkait pada Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Guna mencapai keluaran dari kegiatan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni : 1. Persiapan; 2. Pengumpulan Data primer dan sekunder; 3. Analisis Data primer dan sekunder; 4. Penyusunan Draft Naskah Akademik 5. Penyempurnaan Draft Analisis Kebutuhan/Naskah Akademik melalui FGD dengan Instansi terkait; 6. Finalisasi Analisis Kebutuhan /Naskah Akademik; 7. Presentasi Hasil, 8) Laporan Akhir dan Publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Daerah dalam penelitian ini dilakukan terhadap hal-hal penting sebagai berikut :

Persepsi Pendirian BUMD Perkebunan

Guna mengetahui persepsi dan keinginan terhadap potensi dan peluang pendirian BUMD baru di Kabupaten Tasikmalaya, maka telah dilakukan survei terbatas untuk mengetahui persepsi masyarakat dimaksud.

Secara umum, berdasarkan respons responden yang diwawancara, Pemerintah Kab. Tasikmalaya dipandang perlu mendirikan perusahaan/BUMD baru dengan alasan karena perlunya optimalisasi sektor-sektor unggulan atau potensial di daerah, pemerataan fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa. Selain itu perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pendirian BUMD baru ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor pertanian, khususnya pada sub sektor perkebunan.

Dengan adanya BUMD Perkebunan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi sektor-sektor potensial di daerah yang akhirnya terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mengharapkan dengan adanya BUMD baru diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor pertanian khususnya pada sub sektor perkebunan agar pendayagunaan aset daerah lebih optimal.

Untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kab. Tasikmalaya diharapkan segera mendirikan perusahaan/BUMD baru sebagai sarana peningkatan perekonomian, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan rencana tersebut mayoritas responden pun setuju dengan pendirian BUMD baru ini. Jenis usaha yang nantinya perlu dijalankan, responden menyarankan bidang usaha perkebunan.

Analisis Potensi Ekonomi Sub sektor Perkebunan

Melihat potensi ekonomi yang sangat besar di sub sektor Perkebunan diantaranya pada komoditas Kelapa Dalam, Teh, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta dan Aren. Maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga telah berupaya untuk mengelola manajemen komoditas di sub sektor perkebunan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Iuran Wajib Atas Usaha Komoditas Perkebunan. Berdasarkan Perda tersebut Iuran Wajib diterapkan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yaitu Teh, Karet dan Cengkeh. Sedangkan untuk pembelian komoditas perkebunan diterapkan Iuran Wajib untuk pembelian teh pucuk dan kering, karet kering, kopra, kelapa butiran, cengkeh kering, lada biji kering, rinu biji kering, kapol biji kering dan kopi berasan kering.

Mempertimbangkan hasil analisis potensi daerah ini, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan pengelolaan professional untuk optimalisasi potensi yang dimiliki agar menjadi *income generative* bagi pendapatan daerah. Sekaligus memformulasikan kebijakan yang tepat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya akan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan mendirikan BUMD Perkebunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Analisis Potensi Pasar dan Pemasaran Produk Perkebunan

Produk perkebunan pada umumnya merupakan produk ekspor, oleh karena itu pengembangan dan peningkatan daya saing dalam memasarkan produk bukanlah menjadi hal yang mudah akan tetapi harus ditempuh dengan berbagai upaya untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan. Pada dasarnya produk perkebunan mempunyai peluang pasar yang cukup bagus, tidak hanya di pasar lokal dan nasional tetapi juga sudah terbuka lebar ke pasar ekspor yang bisa dijangkau oleh para pelaku usaha perkebunan besar maupun kecil, sehingga diharapkan nilai tambah produk perkebunan semakin meningkat (Siti Purnama, 2014).

Pada Tahun 2022, nilai ekspor Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat tumbuh positif. Ekspor produk Pertanian mengalami kenaikan sebesar 16,67 persen. Apabila dilihat lebih lanjut, nilai ekspor untuk Sektor Pertanian dari tahun 2013 hingga 2022 menunjukan tren peningkatan yang cukup stabil, mulai dari USD 56,56 juta hingga USD 174,82 juta di Tahun 2020. Hanya saja pada Tahun 2021 mengalami penurunan, dan kemudian meningkat lagi di Tahun 2022 menjadi USD 185,31 juta. Komoditas ekspor hasil pertanian dari Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah komoditas Sarang Burung, Ikan Hias, Manggis, Tanaman Hias, Teh, Kopi, serta Kelapa (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dari beberapa komoditas yang mendominasi ekspor Jawa Barat tersebut diantaranya adalah merupakan komoditas unggulan Kabupaten Tasikmalaya diantaranya Teh, Kopi serta Kelapa serta komoditas Manggis serta komoditas lainnya. Apabila BUMD Perkebunan ini didirikan di Kabupaten Tasikmalaya, maka potensi optimalisasi komoditas perkebunan berdasarkan aspek pasar dan pemasarannya akan sangat signifikan mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya.

Harga komoditas perkebunan di luar negeri (pasar ekspor) akan sangat menentukan harga di tingkat produsen. Sebagian komoditas yang dipasarkan secara ekspor yang juga dimiliki Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan trend meningkat, kecuali komoditas Teh yang sempat menurun pada tahun 2021, walaupun demikian pada tahun 2022 harga rata-ratanya menunjukkan kecenderungan peningkatan lagi. Selain pada konteks ekspor,pasar domestik juga harus mendapatkan perhatian, karena permintaan dan harga produk perkebunan sudah mulai menunjukkan kecenderungan peningkatan. Harapannya, dengan akan dibentuknya BUMD Perkebunan maka punya harapan besar komoditas-komoditas perkebunan yang akan dikelola BUMD Perkebunan tersebut akan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya karena dari sisi harga domestik dan ekspor menunjukkan kecenderungan peningkatan.

Potensi Serapan Tenaga Kerja

Peranan subsektor perkebunan dalam penyediaan peluang berusaha/bekerja semakin penting, mengingat jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan peluang berusaha/bekerja yang diciptakan subsektor lain tidak berlangsung sangat pesat. Menurut data BPS, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) akan menjadi 305,7 juta jiwa. Sampai dengan saat ini dan 20 tahun ke depan hampir setengah penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan yang tentunya akan mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatan (Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, 2021).

Apabila di Kabupaten Tasikmalaya sudah didirikan BUMD Perkebunan, maka harapan besarnya akan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tasikmalaya, karena sektor pertanian khususnya di sub sektor perkebunan serapan tenaga kerjanya sangat besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, telaahan dan analisis kebutuhan pendirian BUMD Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya yang telah di lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum, berdasarkan analisis persepsi maka Pemerintah Kab. Tasikmalaya dipandang perlu mendirikan BUMD baru dengan alasan perlunya optimalisasi sektor-sektor unggulan atau potensial di daerah, pemerataan fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa. Selain itu perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pendirian BUMD baru ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor pertanian, khususnya pada sub sektor perkebunan.

2. Melihat hasil analisis potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan pengelolaan professional untuk optimalisasi potensi pada sub sektor perkebunan yang dimiliki agar menjadi income generative bagi pendapatan daerah. Sekaligus memformulasikan kebijakan yang tepat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya akan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan mendirikan BUMD Perkebunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Berdasarkan Analisis Potensi Pasar dan Pemasaran Produk Perkebunan pada dasarnya memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola dengan professional/melalui BUMD, tidak hanya di pasar lokal dan nasional tetapi juga sudah terbuka lebar ke pasar ekspor yang bisa dijangkau oleh para pelaku usaha perkebunan besar maupun kecil, sehingga diharapkan nilai tambah produk perkebunan semakin meningkat Dari beberapa komoditas yang mendominasi pasar ekspor diantaranya adalah merupakan komoditas unggulan Kabupaten Tasikmalaya diantaranya Teh, Kopi, Kelapa, Manggis serta komoditas lainnya. Apabila BUMD Perkebunan ini didirikan di Kabupaten Tasikmalaya, maka potensi optimalisasi komoditas perkebunan berdasarkan aspek pasar dan pemasarannya akan sangat signifikan mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya.
4. Berdasarkan analisis harga komoditas perkebunan di luar negeri (pasar ekspor) maupun domestik menunjukkan trend peningkatan, Harapannya, dengan akan dibentuknya BUMD Perkebunan maka punya harapan besar komoditas-komoditas perkebunan yang akan dikelola BUMD Perkebunan tersebut akan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya karena dari sisi harga domestik dan ekspor menunjukkan kecenderungan peningkatan.
5. Melihat potensi serapan tenaga kerja, apabila di Kabupaten Tasikmalaya sudah didirikan BUMD Perkebunan, maka harapan besarnya akan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tasikmalaya, karena sektor pertanian khususnya di sub sektor perkebunan serapan tenaga kerjanya sangat besar.
6. Melihat berbagai potensi besar dimaksud maka sudah selayaknya BUMD Perkebunan perlu didirikan di Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai tindaklanjut dari analisis kebutuhan daerah ini, maka disarankan BUMD Perkebunan layak dan sangat mendesak untuk didirikan dengan melihat potensi dan prospek yang menjanjikan pada sub sektor perkebunan dan dalam rangka optimalisasi lahan HGU dan HPL yang belum memberikan kontribusi ke pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan berakhirnya beberapa status Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan-lahan perkebunan yang sudah harus dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan ucapan terima kasih kepada Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah membiayai penelitian ini dan kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akadrun. 2007. Administrasi Perusahaan Negara. Alfabeta. Bandung

Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. 2019. Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(1), 130. https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139 2017.

Abdurachman, A., Dariah, A., & Mulyani, A. (2008). Strategi dan teknologi pengelolaanlahan kering mendukung pengadaan pangan nasional. Jurnal LitbangPertanian ,27 (2), 43-49.

Ayotasik.com. 2021. Ini Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Diakses pada laman: Ayotasik.com. Rabu, 1 September 2021 | 12:24 WIB.

Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka 2019. Tasikmalaya.

Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Jawa Barat 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Bandung.

Badan Pusat Statistik. 2023. Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka 2022. Tasikmalaya.

Bappeda, 2015. Tasikmalaya Dalam Angka 2015. Tasikmalaya: Kantor Statistik Kabupaten Tasikmalaya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 2021. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Bekasi.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung. 2021. Laporan Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tentang Tata Kelola Perkebunan.Kabupaten Tana Tidung.

Draft Revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Kementerian Pertanian. 2022. Statistik Harga Komoditas Pertanian tahun 2022. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2015. Rencana Program Investasi Jangka Menengah. Bidang Cipta Karya Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. http://www.sippa.ciptakarya.pu.go.id. diakses pada tanggal : 24 September 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 2021. RPJMD 2021-2026. Pemkab Tasikmalaya.

Saptana, (2005). Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan 165 Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

Saptana, Tri Bastuti Purwantini, Sunarsih, Amar Kadar Zakaria, Chairul Muslim dan Annisa Rika Rachmita. 2017. Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Palawija dan Sayuran. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementrian Pertanian. Panel Petani Nasional (PATANAS) Laporan Akhir Tahun TA 2017.

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen. 2021. Naskah Akademik Pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Kebumen. Kebumen.

Sekretariat DPRD Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan. Kab. Mahakam Ulu.

Sipayung, Baren. 2017. Penyesuaian Bentuk Hukum BUMD Pasca Pemberlakuan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik PPs-UT

Siti Purnama. 2014. Strategi Pemasaran Produk Perkebunan. https://disbun.jabarprov.go.id/post/view/305-id-strategi-pemasaran-produk perkebunan

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta